

## Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kekerasan Di Kabupaten Bintan

Jepri Jaya<sup>1\*</sup>, Novi Winarti<sup>2</sup>, Eki Darmawan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau  
[bangjeprijaya@gmail.com](mailto:bangjeprijaya@gmail.com)

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: [bangjeprijaya@gmail.com](mailto:bangjeprijaya@gmail.com)

**Abstract:** *This research discusses the increasing child violence in Bintan Regency every year. The purpose of this research is to analyze the implementation of collaborative governance in addressing violence against children. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The theory used is the collaborative governance theory by Ansell & Gash, which consists of five indicators: face to face, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. The conclusion of this research shows that collaborative governance in addressing child violence in Bintan Regency has been implemented, with collaboration between the government, child protection agencies, and the community. The indicators of face to face, trust building, and shared understanding have been quite good through communication and coordination among the actors. However, the indicators of commitment to process and intermediate outcomes still face challenges such as changes in positions, sectoral egos, and time constraints. Although services for victims have started to improve, the rate of child violence remains high and many cases are resolved peacefully. An increase in commitment and coordination is needed to strengthen protection efforts and elevate the status of Child-Friendly Districts.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Child Abuse, Countermeasures*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan yang terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash yang terdiri dari lima indikator: *face to face*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Bintan telah berjalan, dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Indikator *face to face*, *trust building*, dan *shared understanding* sudah cukup baik melalui komunikasi dan koordinasi antar aktor. Namun, indikator *commitment to process* dan *intermediate outcomes* masih menghadapi kendala seperti pergantian jabatan, ego sektoral, dan keterbatasan waktu. Walaupun pelayanan terhadap korban mulai membaik, tingkat kekerasan anak masih tinggi dan banyak kasus diselesaikan secara damai. Diperlukan peningkatan komitmen dan koordinasi untuk memperkuat upaya perlindungan dan menaikkan status Kabupaten Layak Anak.

**Kata kunci:** *Collaborative Governance, Kekerasan Anak, Penanggulangan*

### 1. LATAR BELAKANG

Anak adalah anugerah Tuhan yang berharga dan perlu dilindungi oleh orang tua serta negara. Masa anak-anak merupakan fase penting dalam membentuk karakter, sifat, dan perilaku sebagai bekal masa depan. Lingkungan yang sehat dan kasih sayang orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara fisik dan mental. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

Badan Pembinaan Hukum Nasional). Selanjutnya, menurut Unicef, sepertiga penduduk Indonesia ialah anak-anak yang mana jumlah ini setara dengan sekitar 85 juta dan merupakan jumlah populasi anak terbesar keempat di dunia (Perdana 2024). Anak memiliki hak-hak yang menjadi perhatian khusus yang harus dipenuhi, seperti kesehatan, pendidikan dan yang paling utama ialah perlindungan anak dari tindak kekerasan. Realita yang terjadi di kehidupan anak-anak tidak jarang mengalami tindak Kekerasan bahkan menjadi isu yang panas diberbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat berupa tindakan kekerasan fisik, penganiayaan, seksual atau pengabaian terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau walinya (Oktafien, 2020).

Kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi setiap tahunnya. Kasus kekerasan anak mengalami meningkat setiap waktu ke waktu, hal ini diasumsikan karena anak dianggap sebagai sosok yang rentan dan lemah atau tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekerasan tersebut. Kekerasan anak dapat terjadi dimana saja seperti sekolah, taman bermain, fasilitas umum, tempat kerja bahkan tempat yang kita anggap paling aman yaitu di dalam rumah. Faktor penyebab kekerasan anak di Indonesia juga terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat, salah satunya adalah internet. Pada zaman *internet of things* seperti saat ini, khususnya penggunaan ponsel pintar tanpa pengawasan, serta faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Indonesia. Anak-anak yang terpapar konten negatif dari internet berisiko meniru perilaku buruk, sementara tekanan ekonomi dapat memicu ketegangan dalam keluarga yang berdampak pada perlakuan terhadap anak.

Kemudian Faktor ekonomi turut berperan dalam terjadinya kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Anak dari keluarga kurang mampu rentan menjadi korban ejekan di sekolah karena kesenjangan ekonomi, dan di rumah, tekanan ekonomi sering memicu kekerasan dari orang tua terhadap anak. Sedangkan Menurut Widowati, E & Cahyati kekerasan sering terjadi karena pengaruh lingkungan atau kelompok sebaya, serta paparan media, termasuk siaran media yang tidak sehat, vulgar, setan, pornografi, serta kondisi terkait kekerasan dan konsumerisme (Riandy & Hastuti, 2024).

**Tabel 1.** Jumlah Kekerasan Anak Di Indonesia

No	TAHUN	KASUS
1	2020	11.264
2	2021	11.446
3	2022	16.106
4	2023	18.175
5	2024	19.628

*Sumber:* SIMFONI-PPA, 2024 (Telah diolah kembali)

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat 11.264 kasus, dan jumlah ini meningkat signifikan hingga mencapai 19.628 kasus pada tahun 2024. Lonjakan tertinggi terlihat antara tahun 2021 ke 2022, menandakan bahwa masalah kekerasan anak masih menjadi isu serius yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih intensif.

**Tabel 2.** Jumlah Kekerasan Anak Di Kab/Kota Kepulauan Riau

No	Kota/Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanjungpinang	70	71	67	108	73
2	Batam	86	81	82	91	156
3	Bintan	30	20	29	48	52
4	Karimun	22	15	29	30	41
5	Anambas	9	9	10	23	16
6	Natuna	55	17	98	51	37
7	Lingga	13	17	24	33	23

*Sumber:* SIMFONI-PPA, 2024 (Telah diolah kembali)

Data kasus kekerasan terhadap anak di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang bervariasi di setiap daerah. Kota Batam mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2024 dengan jumlah kasus mencapai 156, tertinggi di wilayah Kepri. Sementara itu, Kota Tanjungpinang mencatat lonjakan kasus pada tahun 2023 sebanyak 108 kasus, namun menurun kembali di tahun 2024. Kabupaten Bintan menunjukkan peningkatan kasus secara bertahap setiap tahun, dari 30 kasus di 2020 menjadi 52 kasus di 2024. Kabupaten Karimun dan Lingga juga mengalami kenaikan jumlah kasus meskipun dalam skala yang lebih kecil. Di Kabupaten Anambas, jumlah kasus sempat meningkat tajam pada tahun 2023, namun kembali menurun di tahun berikutnya. Sedangkan Kabupaten Natuna menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan puncak kasus pada 2022 sebanyak 98 kasus, lalu menurun drastis di tahun-tahun berikutnya. Data ini mencerminkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi isu penting di Kepulauan Riau dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih serius dan terarah di setiap daerah.

Pemerintah Kabupaten Bintan, melalui DP3KB, telah berupaya menanggulangi kekerasan terhadap anak dengan serius, mengingat anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi. Meski DP3KB menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan di daerah, penanggulangan kekerasan anak tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai instansi seperti Unit PPA Polres Bintan, Dinas Sosial, Yayasan Berlian, dan PATBM. Kerja sama ini menjadi kunci untuk mewujudkan penanganan

kekerasan anak yang lebih efektif dan menyeluruh di Kabupaten Bintan. Kolaborasi antar aktor dalam penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Bintan telah berjalan secara terstruktur dan berbasis peran masing-masing. Proses penanganan dimulai dari laporan masyarakat kepada PATBM sebagai pihak terdekat, yang kemudian memberikan pendampingan awal sebelum melanjutkan laporan ke DP3KB. DP3KB selanjutnya mengoordinasikan penanganan dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Unit PPA Polres Bintan, dan Yayasan Berlian. Kolaborasi ini memungkinkan penanganan yang lebih menyeluruh, mulai dari pendampingan hukum, edukasi, hingga pemberian bantuan, serta memastikan pelaku kekerasan mendapatkan sanksi hukum yang sesuai.

Berdasarkan hasil pemaparan data dan latar belakang di atas, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Kekerasan Anak Di Kabupaten Bintan”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Governance**

*Governance* terkadang sering disamakan artinya dengan *government* dikarenakan penyebutannya yang hampir mirip, padahal *governance* memiliki pengertian yang berbeda dengan *government*. *Government* diartikan sebagai lembaga, badan atau fungsi yang gerakkan oleh suatu organ pemerintahan suatu negara sedangkan *governance* memiliki arti cara atau jalan, penggunaan/pelaksanaan oleh suatu kewenangan. Selain itu, *governance* memiliki sifat heterarkis yang bermakna adanya kesetaraan hubungan hanya berbeda dalam fungsinya antara pemerintah, swasta dan masyarakat (Ilmar, 2014). Menurut Tauhid (2022) *governance* berasal dari kata “*govern*” memiliki arti peranan yang lebih besar dimana terdiri dari semua proses, aturan serta lembaga yang terkait pengelolaan serta pengendalian masalah kolektif masyarakat (Rahayu, 2023). Saat ini konsep *governance* sudah mulai di tawarkan dari pada konsep *government*. Perubahan konsep ini secara tidak langsung menimbulkan dampak perubahan dalam pola relasi antar negara dengan masyarakat, negara dan pasar serta pasar dengan masyarakat (Rahman, 2018).

### ***Collaborative Governance***

*Collaborative Governance* sering kita dengar sebagai kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat serta non pemerintah untuk mengambil keputusan demi mencapai tujuan yang sama. Hal ini juga di dukung oleh beberapa pendapat beberapa para ahli. Menurut Ansell dan Gash (2008) *collaborative governance* ialah pendekatan pemerintahan yang

melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik dan program publik (Astuti, Warsono, and Rachim 2020).

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash terdapat lima indikator antara lain:

1) *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Proses *collaborative governance* dimulai dengan *face to face* secara langsung dengan semua *stakeholder* yang turut andil. Tahapan ini sangat penting untuk mengidentifikasi yang berorientasiakan peluang serta keuntungan kelompok. Tahap ini merupakan awalan dalam menentukan tindak-tindakan yang apa saja, untuk dilaksanakan dalam proses kolaborasi itu sendiri. Proses *face to face* ini juga merupakan cikal bakal dari proses *trust building*, *commitment to proses*, *share understanding* dan *intermediate outcomes*. Jika awal proses *face to face* saja belum maksimal, maka proses kolaborasi tersebut tidak akan efektif.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Kepercayaan antar stakeholder adalah elemen penting dalam memulai dan menjalankan kolaborasi. Proses ini tidak hanya diperlukan untuk negosiasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Kepercayaan terbentuk melalui integritas dan komitmen dari setiap pihak. Tanpa kepercayaan, kolaborasi tidak dapat berlangsung efektif. Dengan adanya kepercayaan, kerja sama menjadi lebih produktif karena para pihak merasa aman untuk berbagi ide, memberi umpan balik, dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama.

3) *Commitment to process* (Komitmen Pada Proses)

Dalam proses kolaborasi, ada proses komitmen yaitu keinginan atau dorongan para partisipan untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaborasi. Setiap orang harus berkomitmen serius untuk mencegah risiko yang terjadi selama proses kerja sama. Pada tahap ini, mereka tidak hanya menetapkan tujuan, tetapi juga merencanakan cara untuk mencapainya. Rencana tersebut harus terus dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang berkomitmen, meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan seperti kelelahan, perselisihan, atau bahkan kegagalan sementara.

4) *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Para aktor dalam proses kolaborasi harus memahami satu sama lain untuk mencapai tujuan proses. Ini menunjukkan bahwa para semua pihak yang terlibat dalam proses mencapai kesepakatan tentang apa yang dapat mencapai tujuan bersama. Hal ini memungkinkan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, mereka dapat menghindari kesalahpahaman, mengurangi konflik, dan bekerja sama lebih baik. Pemahaman bersama ini berkaitan dengan

visi misi bersama, tujuan, ideologi serta tujuan bersama yang jelas arahnya. Adanya pemahaman bersama yang kuat, setiap anggota tim merasa dihargai dan dipahami, sehingga kerja sama menjadi lebih produktif.

#### 5) *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Keluaran atau output dari proses yang dilakukan secara kolaboratif terdiri dari pencapaian tujuan proses, keuntungan dari kerja sama, dan adanya kemenangan kecil dari kolaborasi. Selain itu, hasil sementara ini dapat digunakan sebagai proses kritis, guna untuk membangun momen untuk kegiatan kolaborasi sukses. Hasil sementara sangat penting untuk mengevaluasi seberapa baik kerja sama berjalan sesuai rencana dan memastikan bahwa kelompok atau tim sedang bergerak ke arah yang benar untuk mencapai tujuan bersama.

### **Penanggulangan Kekerasan Anak**

Kata penanggulangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “tanggulang” yang memiliki arti menghadapi dan mengatasi, kemudian diberi awalan “pe” dan akhiran “an”. Sehingga membentuk satu kata yang berbunyi “penanggulangan” yang berarti proses, cara dan perbuatan menanggulangi (*typoonline*, 2024). Kekerasan anak menurut WHO definisi kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan yang tidak pantas secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang membahayakan kesehatan, perkembangan, atau harga diri anak dalam hubungan tanggung jawab (Said et al, 2017). Berdasarkan penjelasan kata penanggulangan dan kekerasan terhadap anak diatas. Dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan terhadap anak ialah suatu kegiatan menghadapi, mengatasi dan mencegah dari tindakan kekerasan terhadap anak yang meliputi fisik, psikis emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang membahayakan kesehatan. Serta untuk melindungi hak-hak yang serta menciptakan lingkungan yang seharusnya di dapatkan oleh anak-anak tersebut.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada obyek yang alamiah. Serta peneliti sebagai instrument kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif ini adalah metode penelitian yang berfokus pada menghasilkan gambaran yang luas dan menyeluruh menggunakan kata-kata, memberikan laporan

menyeluruh tentang perspektif informan, dan menyusun temuan dalam konteks alami untuk memahami masalah sosial (Darmawan, 2020) Sedangkan penelitian deskriptif ialah dengan cara untuk menggambarkan suatu temuan hasil penelitian. Jenis penelitian ini memiliki arah tujuan penjelasan, deskripsi dan validasi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Ramdhan, 2021). Narasumber/informan pada penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan, Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Unit IV PPA Polres Bintan, Yayasan Berlian, PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Masyarakat/Keluarga Korban.

Selanjutnya untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Observasi didefinisikan sebagai perhatian yang berfokuskan terhadap kejadian, gejala, fenomena atau sesuatu dilokasi penelitian yang mengharuskan peneliti harus turun tangan secara langsung kelapangan (Emzir, 2010). Kemudian teknik dokumentasi adalah kegiatan penyediaan berbagai dokumen dengan bukti yang akurat didasarkan pada catatan dari berbagai sumber. Dokumentasi juga melakukan pengumpulan foto, audio, hingga video, biasanya dilakukan untuk memperkuat data wawancara (Hasan, 2022). Serta teknik pengumpulan yang terakhir ialah teknik wawancara, menurut Esterberg (2002) wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Tanya jawab tersebut yang akan membuat penulis dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014). Kemudian untuk menganalisis data yang telah terkumpul peneliti dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Indikator *face to face* (Tatap Muka)**

Tatap muka antar aktor-aktor terkait dalam *Collaborative governance* ini ditujukan untuk saling berkomunikasi serta saling bertukar ide dan gagasan. Pada indikator juga ingin mengetahui apakah ada forum atau tatap muka yang dilakukan antar aktor tersebut untuk menyelesaikan kekerasan anak di Kabupaten Bintan. Selanjutnya dari hasil turun lapangan untuk indikator tatap muka (*face to face*) di kabupaten Bintan untuk pertemuan rutin yang membahas masalah kekerasan anak ini sudah berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan aktor yang terlibat DP3KB, Dinsos, PPA Polres Dan Yayasan Berlian dimana tatap muka yang dilakukan dengan cara aktor-aktor tersebut saling mengundang untuk menyelesaikan suatu kasus dan pencegahannya. Tatap muka dilakukan ketika adanya kasus

kekerasan anak yang terjadi untuk menyelesaikan kasus tersebut dan juga membahas kedepannya yang disebut dengan *cash conference*. Selain itu, juga ada rapat gugus tugas KLA (kabupaten/kota layak anak) yang rutin dilakukan di kantor bupati Bintan yang melibatkan aktor-aktor tersebut. Temuan lainnya pada forum tatap muka yang lakukan juga semua aktor secara bersama-sama aktif memberikan gagasan dan idenya untuk menyelesaikan masalah kekerasan anak di kabupaten Bintan.

### **Indikator *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)**

Membangun kepercayaan ialah upaya saling menaruh kepercayaan antar stakeholder dengan adanya kepercayaan antar aktor yang terlibat maka akan membuat tujuan yang ingin dicapai menjadi lebih produktif. Berdasarkan hasil turun lapangan peneliti menyimpulkan pada indikator membangun kepercayaan antar aktor-aktor yang terlibat dilakukan dengan cara memperbanyak koordinasi antar aktor tersebut dan sudahnya saling percaya. Tujuannya dapat berjalan lebih produktif, koordinasi pada indikator ini seperti saling berkomunikasi jika terdapat suatu kasus yang terjadi dimana aktor-aktor tersebut akan saling mengabari agar turun bersama-sama untuk berjumpa langsung dengan korban dan menyelesaikan kasus tersebut sampai selesai. Hasil indikator membangun kepercayaan ini juga dilihat secara langsung hasilnya oleh masyarakat. Peneliti melakukan dengan masyarakat yang peka terhadap kekerasan anak di kabupaten. Selain itu, berdasarkan pendapat yang disampaikan masyarakat tersebut masyarakat merasakan dan mengetahui pihak-pihak tersebut bekerja untuk penanggulangan kekerasan anak di kabupaten Bintan yang dimana untuk penanggulangan kekerasan anak ini masyarakat melihat pada indikator membangun kepercayaan antar tersebut seperti kolaborasi dan saling koordinasi yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut.

### **Indikator *Commitment To Proses* ( Komitmen Pada Proses)**

Berdasarkan hasil turun lapangan peneliti menyimpulkan para aktor yang terkait memiliki kesamaan untuk seberapa pentingnya komitmen pada proses penanggulangan kekerasan anak di kabupaten Bintan. Aktor-aktor terkait menjawab komitmen ini ialah sangat penting bahkan dari penjelasan ibu Kabid PPA DP3KB Kabupaten Bintan, kita dapat melihat untuk membuat komitmen pada proses ini lebih kuat beliau sedang berusaha mengikat dengan perda yang sedang proses untuk membuat komitmen antar opd tersebut menjadi lebih kuat. Selain itu, komitmen para aktor sebut karena kepedulian mereka terhadap hak-hak dan kehidupan anak yang merupakan sebagai generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Komitmen aktor-aktor yang terkait tersebut dalam penanggulangan kekerasan anak

dikabupaten Bintan sendiri juga dilihat secara langsung oleh masyarakat dan keluarga korban di Kabupaten Bintan, peneliti mendapatkan jawaban dari masyarakat Kabupaten Bintan bahwasanya komitmen pada proses penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Bintan sudah dilakukan seperti pendampingan dan pencegahan.

Selanjutnya dari pemaparan jawaban informan tersebut untuk indikator pada proses dalam penelitian ini terdapat beberapa hambatan seperti waktu kerja karena aktor-aktor tersebut memang memiliki tugas-tugas lain sehingga terkadang para aktor yang terlibat tersebut tidak selalu bisa turun kelapangan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersamaan. Namun untuk hambatan waktu ini para aktor yang terlibat mengatasinya dengan komunikasi sehingga walaupun diantara mereka ada yang tidak bisa hadir mereka tetap akan berkomunikasi sehingga mereka dapat memantau dari tempat yang berbeda untuk hasilnya. Selanjutnya hambatan yang dialami indikator ini ialah waktu kerja pimpinan dinas tersebut yang tidak lama seperti yang disampaikan oleh pihak PATBM, terkadang pemimpinan dinas tersebut hanya beberapa tahun saja menjadi kepala di dinas tersebut. Menyebabkan pimpinan tersebut tidak cukup waktu untuk memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dan terkadang juga saat seorang pimpinan tersebut sudah paham malah dipindahkan ke instansi lainnya sehingga semua yang diatur atau disusun kembali lagi mulai dari nol atau dari bawah. Peneliti juga menemukan hambatan seperti ego masing-masing dinas tersebut yang mana terkadang dinas tersebut masih ego saat menyelesaikan kasus tersebut.

### **Indikator *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)**

Pemahaman bersama ialah menggambarkan bagaimana aktor-aktor yang terlibat memahami masalah yang dihadapi secara spesifik. Pemahaman bersama juga membantu aktor untuk mencapai tujuannya dimana pemahaman bersama dalam forum ini adalah tanggung jawab aktor tersebut dan untuk pemahaman bersama dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil turun lapangan peneliti menyimpulkan untuk pemahaman bersama antar aktor-aktor yang terlibat sudah terjalin. Pemahaman ini dilakukan dengan menyeleraskan pemahaman antar aktor tersebut dalam permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Bintan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, perundingan, pelatihan seminar dan komunikasi yang melibatkan aktor-aktor tersebut. Peningkatan sdm di aktor masing-masing juga harus ditingkatkan serta penguatan komitmen dari aktor-aktor yang terlibat. Selain itu, aktor-aktor tersebut juga memiliki kesamaan persepsi, definisi dan penyebab terjadinya kekerasan anak.

Contohnya jika terdapat kasus aktor tersebut akan saling berkomunikasi atau biasanya aktor tersebut akan saling menyurati sesama aktor untuk melakukan perundingan dalam menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Perundingan ini juga tidak hanya membahas kasus yang terjadi tetapi juga akan membahas untuk langkah pencegahan agar tidak akan ada kembali kasus yang sama terjadi kembali. Tujuannya agar upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan dapat berjalan lebih baik dan terkoordinasi dengan baik jika ada pemahaman dan komunikasi yang baik. Selain itu, masyarakat dan keluarga korban juga merasakan pemahaman bersama yang dimiliki para aktor yang terlibat sudah berjalan dengan baik dan berkompeten dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan.

### **Indikator *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)**

Hasil sementara ialah proses yang sedang berlangsung, memberikan hasil sementara yang berfungsi menjadi evaluasi kolaborasi untuk kedepannya dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil turun lapangan peneliti menyimpulkan untuk hasil indikator hasil sementara menunjukkan bahwa dalam hal kerja sama antar aktor tersebut dalam penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Bintan menjadi lebih optimal karena semua aktor tersebut saling terlibat dan terhubung. Selain itu, hasil sementara lainnya dari kolaborasi ialah membuat koordinasi menjadi lebih baik sehingga lebih meningkatkan pelayanan perlindungan anak di Kabupaten Bintan diakibatkan karena terjalannya kerjasama tersebut. Selain itu, untuk pada indikator hasil sementara ini jika dilihat dari KLA (kota/kabupaten layak anak) masih *stagnan* atau tidak ada kemajuan hal ini dikarenakan Kabupaten Bintan saat ini berada pada tingkat madya dan masih belum berhasil naik kesatu tingkat lebih baik. Namun, secara umum berdasarkan penjelasan sebelumnya untuk hasil sementara seperti pelayanan dan kegiatan lainnya yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Bintan sudah cukup baik

Masyarakat juga melihat usaha-usaha atau perubahan yang dilakukan aktor-aktor tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Bintan. Masyarakat menilai walaupun belum ada grafik penurunan dari jumlah kasus. Namun masyarakat beranggapan masyarakat sekarang sudah mulai berani untuk melaporkan kejadian ke aktor-aktor terkait sehingga kasus tersebut dapat ditangani, hal ini juga merupakan salah satu rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sehingga masyarakat sudah mulai terbuka untuk *speak up*. Mudah-mudahan masyarakat untuk melapor juga karena sudah banyak tempat-tempat masyarakat untuk melaporkan. Seperti ditingkat desa saja sudah ada PATBM yang merupakan salah satu aktor

terdekat dari masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan. Selain itu, angka kekerasan yang tidak menurun juga disebabkan oleh banyak korban yang berdamai dengan pihak pelaku dengan syarat-syarat tertentu. Biasanya hal ini, terjadi kepada korban yang pelakunya itu sendiri dilakukan oleh keluarga korban tersebut. Sehingga masih banyak kasus yang belum diketahui oleh aktor-aktor yang terlibat tersebut dikarenakan korban dan pelaku sudah menyelesaikannya lewat jalur kekeluargaan. Hal ini, juga akan membuat calon-calon pelaku lainnya tidak merasa tidak akan takut jika kebanyakan kasus yang akhir berjalan dengan damai. Selain itu, rendahnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri juga menjadi tantangan dalam menekan kekerasan anak ini. Sejauhnya mana pemerintah melakukan edukasi, seminar dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kekerasan anak, jika memang rendahnya kesadaran masyarakatnya kasus-kasus baru pun akan timbul kembali.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti dapat menarik kesimpulan beberapa hal terkait *collaborative governance* dalam penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Bintan, sudah berjalan semestinya dari lima indikator dalam teori tersebut sudah ada yang berjalan dengan baik dan masih ada yang perlu ditingkatkan kembali. Indikator tatap muka dalam kolaborasi ini sudah berjalan dengan yang dibuktikan dengan seringnya aktor tersebut saling berjumpa secara langsung untuk menyelesaikan kasus kekerasan anak. Selanjutnya indikator membangun kepercayaan yang dilakukan dengan saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Selanjutnya pemahaman bersama antar aktor yang memiliki pemahaman bersama dalam penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Bintan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sudah mulai timbul, walaupun masyarakat belum semua masyarakat Kabupaten Bintan berpartisipasi, setidaknya sudah ada partisipasi dari masyarakat seperti masyarakat sudah mulai berani melaporkan kekerasan yang terjadi disekitarnya ditambah juga dengan sudah banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam organisasi serta kegiatan-kegiatan yang peduli dengan anak di Kabupaten Bintan.

Selanjutnya untuk indikator komitmen pada proses dan hasil sementara juga sudah berjalan namun harus lebih ditingkatkan kembali. Komitmen pada proses aktor-aktor yang terlibat sudah cukup baik dikarenakan para aktor sudah melakukan komitmennya seperti pedampingan, pencegahan, dan sosialisai namun masih terdapat beberapa hambatan seperti waktu kerja yang membuat aktor tersebut tidak bisa selalu turun lapangan bersama-sama, serta waktu pimpinan yang menjabat yang tidak terlalu lama. Sedangkan hasil sementara membuat

penanggulangan dan pelayanan dalam kekerasan terhadap anak menjadi lebih optimal akibat adanya keterlibatan dan saling terhubungan antar aktor tersebut. Namun dalam angka kekerasan masih sering terjadi karena masih banyak kekerasan terhadap anak yang berakhir damai dengan jalur kekeluargaan. Serta tidak adanya peningkatan dalam KLA yang stagnan di tingkat madya.

### **Saran**

Penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Bintan tidak bisa diserahkan pada satu instansi saja, melainkan memerlukan kolaborasi antar lembaga. Berdasarkan observasi lapangan, indikator seperti tatap muka, kepercayaan, dan pemahaman bersama sudah berjalan baik, namun perlu ditingkatkan. Komitmen dan koordinasi antar aktor juga harus diperkuat, salah satunya dengan membuat MoU. Aktor diharapkan lebih aktif dalam kerja sama, edukasi, sosialisasi, serta memperbaiki sistem pelaporan agar kasus tidak diselesaikan secara damai tanpa proses hukum. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam upaya menghilangkan kekerasan terhadap anak.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Astuti, S. R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik* (Tim DAP Pres., Ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro Press.
- Darmawan, E. (2020). Analisis sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Government – JOG*, 5(2), 106–125.
- Definisi atau arti kata penanggulangan berdasarkan KBBI online. (2024). Typoonline. <https://typoonline.com/kbbi/penanggulangan>
- Emzir. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Hasan, H. (2022). Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, 2(1), 23–29.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum tata pemerintahan* (1st ed.). Kencana.
- Oktafien, F. (2020). Collaborative governance dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017–2019. *JOM FISIP*, 8(3), 248–253.
- Perdana, K. R. (2024). Data jumlah anak usia 0–19 tahun di Indonesia 5 tahun terakhir hingga 2023. *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-anak-usia-0-19-tahun-di-indonesia-5-tahun-terakhir-hingga-2023>
- Rahayu, S. (2023). Collaborative governance dalam penanggulangan kekerasan seksual (studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam) [Unpublished thesis]. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Rahman, F. (2018). *Teori pemerintahan* (1st ed.). UB Press.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian* (A. A. Effendy, Ed.). Cipta Media Nusantara.

- Riandy, D. M., & Hastuti, R. (2024). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surakarta. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(1).
- Said, A., Budiati, I., Ayuni, S., Reagan, A. H., Susanto, Y., Avenzor, A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, I. A., & Riyadi. (2017). *Statistik gender tematik – Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia* (A. Said, S. D. Indah, & Lukitasari, Eds.). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif dan R&D* (Alfabeta, Ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>